



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RODI YANTARI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 645210

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.461.720.000
1. Tanah Seluas 19.120 m ² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI	Rp. 1.147.200.000	
2. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m ² /50 m ² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 15.242 m ² /40 m ² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 914.520.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	280.500.000
1. MOBIL, TOYOTA/KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
2. MOTOR, HONDA X1N02Q43LO A/T SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	466.347.823
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.208.567.823
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.208.567.823

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.